

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POLA KEMITRAAN A-B-G DI DESA BARUSARI DAN PADAASIH KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Oleh: Okke Rosmaladewi

Abstrak

Rendahnya pengetahuan, ketrampilan dan daya beli masyarakat khususnya buruh tani di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut menjadikan mereka berada pada lingkaran kemiskina. Telah banyak \program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk membantu masyarakat miskin agar keluar dari masalahnya dan telah banyak biaya yang telah dikeluarkan, tetapi banyak program tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak sesuai dengan tujuan dan jauh dari sasara. Hal ini terjadi karena program pemberdayaan masyarakat tersebut bersifat parsia, tidak membangun systemdan biasanya diberikan dalam bentuk donasi dan hanya sesaat, sehingga menyebabkan buruh tani semakin tergantung kepada pihak yang lain dan tetap tidak berdaya. Pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan A-B-G merupakan salah satu alternatif dan dianggap lebih baik karena bersifat sistemik lebih komprehensif dengan partisipasi semua stake holder dalam pengentasan kemiskinan dapat langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan khususnya dalam mendorong berlangsungnya transformasi sosial dari masyarakat miskin menjadi masyarakat berdaya, masyarakat mandiri, dan akhirnya menjadi masyarakat madani.

Kata kunci ; Pemberdayaan, Pola kemitraan A-B-G

Abstract

The inadequacy of knowledge, skills and purchasing power particularly farmers in the sub-district of Pasirwangi Garut has turned them into the cycle of poverty. It has been abundant of community empowerment program aimed to help the poor to pop off the conflicts and cost a lot already, but many programs are not suitable with the community needs, it is not fit with the purpose and outlying targets. This happens because the empowerment program is parsia, it does not build a system and usually given through temporarily donations, thus it caused the farmers depended on other parties but still powerless. Empowering communities via partnership of 'A-B-G' is one of the alternatives and considered better because it has more comprehensive systemic supported by every stakeholders participation in order the alleviation of poverty that might be directly perceived its benefits for the community because it fits their needs. The program is also sustainable, especially in encouraging the on-going social transformation from poor to empowered, independent, and eventually becoming a civil society.

Key words: empowerment, partnership ABG

PENDAHULUAN

Sampai saat ini masih terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi

oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Garut, sehingga Kabupaten Garut tergolong daerah tertinggal. Beberapa permasalahan diantaranya: Total

penduduk Kabupaten Garut sebanyak 2,2 juta orang dan 15,32 % adalah penduduk miskin. Jumlah penganggur terbuka usia 10 tahun ke atas diatas 11 %, demikian juga di bidang pendidikan dan kesehatan masih rendah.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan utama di atas, juga isu strategis pembangunan nasional dalam RPJM nasional tahun 2005-2025, dan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013, maka disimpulkan bahwa isu strategis pembangunan Kabupaten Garut tahun 2009-2014, diantaranya : Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Reformasi birokrasi dan tatanan pemerintahan, Penguatan struktur perekonomian daerah, Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang, Upaya mengurangi penurunan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta Pembangunan kehidupan, sosial, politik dan budaya yang demokratis.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan isu strategis tersebut serta untuk menjaga sinergitas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional maupun nota kesepahaman yang telah ditanda tangani dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka di dalam dokumen RPJMD tahun 2009-2014 Kabupaten Garut mempunyai visi, yaitu: “Terwujudnya Garut yang mandiri dalam ekonomi, adil dalam budaya dan demokratis dalam politik dengan didasari ridlo Allah SWT”. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan misi pembangunan, yang merupakan prioritas yaitu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agroindustri, agroindustri dan pariwisata.

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Garut selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat

antar wilayah, dalam hal ini kesenjangan antar wilayah baik antar kabupaten/kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Untuk menjamin keseimbangan pembangunan daerah antar wilayah di Kabupaten Garut maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Terutama di daerah yang tertinggal yang berada di Kabupaten Garut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang sudah banyak dilaksanakan di berbagai daerah. Sejak tahun 1998 di Kabupaten Garut telah dilaksanakan program pengentasan kemiskinan, tetapi program pengentasan kemiskinan tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan masih bersifat parsial dan biasanya hanya memberikan donasi saja, sehingga banyak program pengentasan kemiskinan tidak mewujudkan masyarakat yang berdaya.

Program pemberdayaan masyarakat yang selama ini sudah dilaksanakan tidak komprehensif dan tidak membangun system, dan belum mendapat dukungan dari berbagai pihak. Selain itu Partisipasi masyarakat untuk program pemberdayaan masyarakat ini juga masih rendah. Hal ini menjadikan masyarakat tidak mandiri, sangat tergantung kepada bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu perlu dikaji upaya pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas multi pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. melalui pola kemitraan Akademisi-Bisnis dan Government (A-B-B-G) yang telah dilaksanakan di Desa Barusari dan Padaasih Kabupaten Garut.

Metode

Secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (1999) bahwa “Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang luhur, terutama masyarakat yang dalam kondisinya sekarang dalam kesulitan untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Dengan kata lain pemberdayaan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat”

Menyadari akan hal tersebut, seluruh kegiatan Pola kemitraan telah diinisiasi dan dilaksanakan di Desa Barusari mulai tahun 2008 sampai sekarang. Pada tahun 2010 setelah dilaksanakan evaluasi bersama semua lembaga yang bermitra program ini menjadi model dan dikembangkan di Desa Padasih. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui pendekatan system, melalui langkah- langkah sebagai berikut :

1. Persiapan

Persiapan yang selalu dilakukan dalam melaksanakan suatu program melalui tahapan sebagai berikut :

- Identifikasi kelompok masyarakat yang akan dibina
- Need Assesment terhadap masyarakat sasaran
- Identifikasi kebutuhan / masalah yang dihadapi sasaran
- Identifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat mendukung program pola kemitraan
- Identifikasi Lembaga mitra yang dapat mendukung pola kemitraan

2. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

- Pemetaan kebutuhan dan masalah berdasarkan Need assessment
- Penyusunan rencana program berdasarkan identifikasi potensi yang dimiliki daerah dengan menerapkan sistem pole kemitraan
- Perencanaan kerjasama dengan lembaga Mitra untuk pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tahap – tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut

- Sosialisasi kegiatan baik kepada mitra maupun masyarakat sasaran.
- Pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap kelompok dalam pelaksanaan usaha terpadu antara pertanian dan peternakan
- Adanya pendampingan, pembinaan dan penguatan kepada kelompok secara intensif dan berkesinambungan.

4. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dilakukan terhadap seluruh proses kegiatan pada saat kegiatan sedang berlangsung.
- Evaluasi, dilakukan ketika ada hasil kerja yang kurang optimal sehingga perlu ada upaya perbaikan/peningkatan kinerja.
- Pada akhir program, dilaksanakan evaluasi bersama dengan semua lembaga mitra. Untuk mengetahui kelemahan dan berupaya untuk memperbaiki program

5. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berkala sejak awal program mulai berlangsung, pertengahan program, sampai akhir program. Pelaporan dilakukan terhadap pihak – pihak yang bermitra dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan peternakan ini.

Pelaporan dimaksudkan agar semua pihak dapat melakukan evaluasi dan melaksanakan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pola Kemitraan A-B-G di Desa Barusari dan Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Jumlah penduduk Desa Barusari sebanyak 5725 orang, dan 85% dari jumlah penduduk Desa Barusari mencari nafkah di bidang pertanian. Dari jumlah tersebut, sebesar 2433(%) orang adalah buruh tani, dan bila dilihat dari pendidikannya kebanyakan buruh tani mempunyai tingkat pendidikan yang rendah yaitu tidak tamat SD dan lulusan SD.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di Desa Padaasih. Dari jumlah penduduk sebanyak 6720 orang, sebanyak 80% adalah buruhtani yang berpendidikan rendah. Pendidikan yang rendah, kepercayaan diri yang lemah disertai ketidakberdayaan untuk mengembangkan usaha karena masalah permodalan, manajemen dan pemasaran merupakan gambaran umum dari masyarakat ekonomi lemah di daerah ini.

Bila melihat potensi daerah 78% -85 % lahan Desa Barusari dan Padaasih merupakan lahan pertanian Hortikultura dengan komoditas yang diusahakan yaitu kentang, kubis dan tomat, sedangkan di Desa Padaasih 75% - 80 % lahan pertanian padi dan hortikultura terutama sayuran seperti Sosin, pecay dan kubis.

Rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani di ke dua desa tersebut jelas akan mempengaruhi produktivitas kerjanya dan akan selamanya buruh tani berada pada posisi tawar yang rendah sehingga selamanya buruh tani berada pada lingkaran kemiskinan dan tidak berdaya.

Untuk meningkatkan taraf kehidupan buruh tani yang termasuk dalam golongan warga miskin tersebut, diperlukan suatu diversifikasi usaha yang sejalan dengan bidang pertanian sehingga buruh tani dapat memanfaatkan waktu luang setelah mereka bekerja di lahan pertanian. Peternakan domba merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan taraf kehidupan buruh tani di Desa Barusari dan Padaasih. Karena dengan diversifikasi usaha yang sejalan dengan bidang pertanian, akan meningkatkan pengetahuan dan ketarmpilan petani dan pada akhirnya diharapkan buruh tani dapat meningkatkan pendapatan.

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ini, telah banyak bantuan yang diberikan baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Bantuan yang diberikan tidak sedikit ini yang akhirnya jauh dari sasaran karena dalam pelaksanaannya tanpa ada pembinaan dan pengawasan, sehingga bantuan yang diberikan sering diibaratkan angin sejuk yang hanya lewat dalam waktu sekejap, tetapi masyarakat masih tetap miskin. Biasanya dengan Sistem pemberdayaan masyarakat melalui donasi modal yang diberikan berupa bantuan ternak atau yang lainnya, kadang hanya dimiliki dalam waktu yang singkat dan habis terjual karena harus bersaing dengan kebutuhan sehari- hari ditambah dengan keterbatasan pengetahuan dan teknologi dalam mencapai keberhasilan usaha. Serta lemahnya sistem pengawasan, menyebabkan buruh tani tetap miskin dan tidak berdaya.

Awal program Pola Kemitraan dilaksanakan di Desa Barusari mulai

bulan Oktober 2008, dimana sebanyak 60 orang orang petani (yang tergabung kedalam 6 KUBE) melalui program pemberdayaan Fakir miskin telah mendapat bantuan ternak dari Dinas sosial Propinsi Jawa Barat sebanyak 252 ekor terdiri dari ternak betina 216 ekor dan ternak jantan 36 ekor. Dan tahun 2010 dikembangkan di Desa Padaasih sebanyak 8 kelompok (80 orang).

Melalui Program Pola kemitraan ini sebanyak 140 orang (14 KUBE) mendapat bantuan material kandang serta fasilitas pelatihan dari perusahaan dan bimbingan teknis dan pendampingan secara intensif dari Perguruan Tinggi.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan pembelajaran masyarakat, yang terkait dengan pendampingan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat, Selama tahun 2008-2011 masyarakat yang tergabung dalam 14 kelompok KUBE pola kemitraan ini telah melaksanakan pelatihan- pelatihan baik secara formal maupun informal. Pelatihan tidak hanya menyangkut hard skill saja tetapi juga pembinaan soft skill yaitu dengan membiasakan mereka untuk tetap bersatu dalam kelompok , bergotong royong dan tetap peduli sesama sehingga sikap kesetiakawanan sosial diantara mereka dapat terus tumbuh.

Dari hasil pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan serta pembinaan dan pendampingan yang intensif dari berbagai lembaga yang tergabung dalam pola kemitraan, telah banyak pencapaian yang diraih oleh KUBE di kedua desa tersebut diantaranya:

1. Peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan produktivitas SDM yaitu dengan meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap anggota kelompok. Selain itu

anggota kelompok berpartisipasi secara aktif dalam setiap pertemuan kelompok terutama dalam membahas permasalahan yang timbul secara bersama-sama, solidaritas antar anggota ataupun dengan luar anggota semakin tinggi, terbentuknya inisiatif-inisiatif yang datang dari kelompok (seperti membentuk kebun kelompok sebagai sarana untuk bertemu dan sebagai percontohan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pertanian).

2. Terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam pengembangan usaha dan pengembangan ekonomi mikro. Indikator keberhasilannya yaitu ; pengetahuan budidaya domba semakin meningkat (bisa terlihat dari diskusi-diskusi yang dilakukan dan jumlah permasalahan yang semakin berkurang), sikap percaya diri semakin tinggi (ketergantungan terhadap pihak lain semakin berkurang), lebih realistis dalam menghadapi permasalahan. Serta mulai terbentuk kesadaran para peternak yang sekaligus sebagai petani tentang kesalahan cara bercocok tanam selama ini yang banyak menggunakan pupuk anorganik, selain itu mulai timbul kesadaran tentang pentingnya menabung yaitu dengan terbentuknya tabungan kelompok
3. Peningkatan pendapatan kelompok/ peternak & peningkatan Jumlah ternak pada masing-masing kelompok
4. Peningkatan kualitas ternak domba, dengan mengganti ternak dengan kualitas genetik yang lebih baik.
5. Pengembangan usaha kelompokselain peternakan seperti budidaya lele dan belut, pembibitan kentang, budidaya ayam pelung,

dan jual beli pupuk dan jual beli beras. Prediksi keuntungan (BC rasio) dari usaha tersebut adalah Lele dan Belut 1.04, Pembibitan kentang 1.5, Beras 1.15, usaha jual beli pupuk 1.1, dan dari budidaya ayam pelung adalah 1.27. Jika dilihat dari BC rasionya maka alternative pengembangan usaha yang mempunyai peluang yang baik untuk dikembangkan yaitu usaha pembibitan kentang dan budidaya ayam pelung.

6. Pendampingan dan pembinaan terus dilakukan secara intensif dengan tujuan untuk memberikan motivasi, fasilitasi, mediasi ataupun solusi terhadap permasalahan kelompok, untuk mencapai keberhasilan program.
7. Pada awal tahun 2010 telah dirintis Pra Lembaga Ekonomi Mikro. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan a) Sosialisasi Program b)Pelatihan & Penguatan Kelompok c)Study banding kelompok d)Pendampingan Kelompok e)Rapat Pra pendirian LKM f) Rapat Pendirian LKM g) Pelatihan dasar Operasional LKM h)Pemagangan & study Banding i) Workshop SOP dan instalasi IT j) Serah terima infrastruktur, dana operasional dan modal bergulir k) Workshop Penyusunan rencana bisnis LKM.

Selain keberhasilan yang telah diuraikan diatas, salah satu dari KUBE yang dibina yaitu KUBE Doa bersama pada tahun 2010 telah berhasil menjadi juara nasional peringkat ke 3 KUBE berprestasi, dan juara ke 4 pendamping berprestasi tingkat nasional. Sedangkan pada Tahun 2011 pendamping program pola kemitraan menjadi juara Ke I Pendamping berprestasi tingkat Nasional.

Pola Kemitraan Akademisi-Bisnis dan Government sebagai Alternatif

Pola kemitraan, sesungguhnya ini menjadi roh dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu instrumen untuk mewujudkan asas kebersamaan dan kekeluargaan dalam perekonomian nasional dan implementasinya di lapangan adalah melalui kemitraan usaha.

Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pola kemitraan adalah fairness, transparansi, akuntabel, kepercayaan, dan kesetaraan antara pihak yang bermitra. Untuk mendapatkan kemitraan yang ideal, prinsip kesetaraan, kepercayaan, transparan harus dipegang teguh. Selain itu, pihak-pihak yang bermitra, harus sama-sama mengetahui sosial kultur dari kedua belak pihak. Pihak peternak/petani harus memahami siapa dan bagaimana kemitraan yang dibangun. Perusahaan dan lembaga mitra harus mengetahui kondisi sosial ekonomi serta harapan dari petani atau sasaran program.

Kondisi sosial, serta karakter masyarakat terkadang menjadi faktor determinan kesuksesan dari suatu kemitraan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Karakter masyarakat satu daerah berbeda dengan daerah lain. Karena itu, pendekatan penyelesaian masalah antara satu sama lain terkadang berbeda. Kemitraan yang ideal harus berlandaskan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya, saling terbuka dan setara. Semua pihak yang bermitra harus menjadi pemilik program, sama-sama menempatkan diri sebagai anggota yang berperan penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah program kemitraan.

Kemitraan biasanya terjalin antara pihak-pihak yang bermitra apabila adanya kesamaan kepentingan, kebutuhan, saling

memperkuat atau saling menguntungkan. Akan tetapi dapat pula timbul karena adanya faktor lain seperti faktor dorongan pembinaan. Kemitraan dapat pula sebagai model pemberdayaan kelompok untuk lebih meningkatkan kemampuan untuk mencapai target yang dicita-citakan.

Pola kemitraan dalam pengembangan usaha peternakan mempunyai maksud tujuan yang khas, dimana output yang diharapkan tidak hanya bernilai ekonomis (*tangible benefit*) tetapi berupa manfaat non ekonomi (*intangible benefit*) serta perbaikan lingkungan fisik yang akan dirasakan baik oleh anggota kelompok maupun masyarakat sekitarnya. Masing-masing pihak yang bermitra harus melakukan peranan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berbagai strategi dan program telah diupayakan dalam pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, hasilnya belum maksimal. Disadari bahwa strategi dan program pemberdayaan masyarakat tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah, mulai dari pusat sampai Propinsi dan Kabupaten/Kota. Peran dan dukungan masyarakat, perguruan tinggi termasuk para pelaku bisnis (perusahaan) dan stakeholders lainnya juga sangatlah penting. Menyadari keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah perlu didukung oleh sumberdaya yang lain termasuk oleh para pelaku bisnis itu sendiri. Tanpa ada kemauan dari para pelaku bisnis untuk melakukan perbaikan, bagaimanapun besarnya sumberdaya yang dialokasikan akan sia-sia saja.

Jadi sinergitas didalam pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penentu dalam rangka menjadikan masyarakat miskin menjadi berdaya dan akhirnya menjadi masyarakat mandiri. Salah satu sinergitas yang telah dilakukan yaitu kerjasama atau kemitraan antara Akademisi-Bisnis dan Government (A_B_G) yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Melalui pola kemitraan A-B-G, diharapkan terjadinya alih teknologi dan manajemen dari Akademisi kepada masyarakat sasaran melalui strategi peningkatan kapasitas SDM secara kontinyu dan berkelanjutan serta pendampingan yang intensif.

Pihak akademisi berkiprah dalam pola kemitraan ini sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu program pengabdian masyarakat. Melalui program ini perguruan tinggi dapat mengamalkan dan mengembangkan keilmuannya dan dapat lebih mendekatkan kepada masyarakat sasaran. Selain itu melalui Pola kemitraan ini adanya dukungan modal dan peningkatan jaringan kemitraan dengan perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR yang dilaksanakan perusahaan melalui pola kemitraan ini sebagai wujud pelaksanaan “services empowerment” yaitu dengan membangun hubungan emosional dan fungsional dengan masyarakat sasaran dan menjadikan masyarakat sebagai mitra yang dapat berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program.

Kontribusi perusahaan melalui program CSR sebagai salah satu solusi pada pola kemitraan ini dapat memperkuat daya saing masyarakat. Kemitraan kuat akan mendorong masyarakat yang lebih maju. Dalam kaitan ini, kepedulian perusahaan akan memberi manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejolak sosial sebagai akibat adanya kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu perusahaan yang telah melaksanakan CSR dengan benar dan sesuai akan mendapatkan reward baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Kartini, Dwi (2009: 111) reward yang diperoleh perusahaan melalui pola kemitraan ini yaitu program lebih tepat sasaran, dan lebih terorganisasi dalam pelaksanaannya. Perusahaan akan semakin diapresiasi dan pada akhirnya

perusahaan mendapatkan reputasi yang diharapkan

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Pola kemitraan A-B-G dapat dijadikan salah satu alternatif model pemberdayaan masyarakat, dimana semua lembaga yang bermitra dapat langsung membina masyarakat dan berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan A-B-G dianggap lebih baik karena dengan partisipasi semua stake holder dalam pengentasan kemiskinan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong berlangsungnya transformasi sosial dari masyarakat miskin menjadi masyarakat berdaya, masyarakat mandiri, dan akhirnya menjadi masyarakat madani.

Pembinaan dan pendampingan yang intensif dari lembaga mitra yang terlibat dalam pola kemitraan ini sebagai kekuatan untuk mempersiapkan masyarakat untuk lebih mandiri. Pola kemitraan A-B-G telah memberikan kekuatan besar untuk tercapainya tujuan suatu program. Pola kerjasama ini juga memberikan pengaruh mutualisme terhadap berbagai pihak, baik terhadap pihak yang bermitra juga terhadap pihak yang menjadi sasaran program. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh pihak tertentu dapat ditutupi oleh pihak yang lainnya dan setiap lembaga yang bermitra melaksanakan fungsi pengawasan sehingga masing-masing pihak dapat mengevaluasi dan melaksanakan perbaikan program secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Kartini. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi*

Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Refika Aditama. Bandung

Okke Rosmaladewi. 2008.

Pengembangan Ekonomi Mikro dalam upaya pemberdayaan

Peternak di Desa Barusari

Kecamatan Pasirwangi. Kabupaten Garut.

Pakpahan. 1989. *Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial Perspektif Institusi.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor

Saeful Hakim.S. 1998. *An Evaluation of Earlier Programmes to Strengthen Rural-Urban Linkages (PARUL).* UNDP

Sarjono Soekanto. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar.* CV. Rajawali. Jakarta

Syafaat 1995. *Studi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Menunjang Pertanian Rakyat Terpadu di Kawasan Timur Indonesia.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Bogor.

Ir, Okke Rosmaladewi, M.M.Pd. Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Islam Nusantara.